

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertengahan tahun 2005 terjadi peperangan di daerah Sheba'a Farms antara Israel dan Hizbollah. Sheba'a Farms merupakan tanah yang diambil Israel pada saat terjadi konflik dengan Syria pada tahun 1967, sehingga pemerintah Lebanon dan Hizbollah yang dibantu oleh Syria mengklaim bahwa Sheba'a Farms merupakan wilayah Lebanon, dan Hizbollah menyatakan bahwa aktivitas militer yang dilakukan di Sheba'a Farms adalah sebuah tindakan yang sah untuk melawan okupasi yang dilakukan Israel. Pada bulan November tahun 2005 pejuang Hizbollah melintasi perbatasan Israel - Lebanon dan memasuki Desa Ghajar<sup>1</sup> bermaksud untuk membalas yang telah dilakukan oleh Israel dengan menyusup masuk ke daerah sekitar Aita al Chaab, Lebanon Selatan.

Konflik semakin memanas pada tahun 2006 tepatnya pada tanggal 12 Juli 2006 saat sekelompok pejuang Hizbollah melewati perbatasan Lebanon dan memasuki Israel kemudian menyerang patroli militer Israel, menangkap dua tentara

---

<sup>1</sup> Tim Youngs and Claire Taylor, 2007, "Research Paper 07/08 : The Crisis in Lebanon", House of Commons Library, teks asli berbunyi :

*"In mid 2005 fighting broke out in the Sheba'a Farms sector and in November 2005 fighters from Hizbollah's military wing, the Islamic Resistance, cross the border to mount a raid Ghajar village. Israel responded with artillery and tank fire and aerial bombing along the length of the Blue Line, but chose not to escalate this crisis further, perhaps leading Hizbollah to conclude that similar raids in the future would bring only a limited Israeli response."*

dan membunuh delapan lainnya<sup>2</sup>. Israel menanggapi aksi tersebut dengan mengirimkan pasukan - pasukan melewati perbatasan menuju Lebanon. Perdana Menteri Israel langsung menyatakan perang terhadap Hizbollah, dan Hizbollah menyatakan apa yang dilakukan merupakan sebuah balasan dari penahanan warga Lebanon yang dipenjarakan di Israel. Masalah ini semakin membesar setelah Israel juga menyerang Lebanon yang dianggap melindungi Hizbollah, sehingga membuat kota - kota di Lebanon dan tempat - tempat pengungsian warga Palestina hancur karena dianggap sebagai tempat persembunyian Hizbollah sehingga membuat banyak korban berjatuhan.

Peperangan terjadi di sepanjang perbatasan Israel - Lebanon terutama di wilayah Lebanon Selatan dimana antara dua pihak saling menyerang, baik dengan artileri maupun dengan menggunakan serangan roket. Roket Hizbollah menghancurkan beberapa kota - kota di Israel dan juga sarana penting Israel, disisi lain Israel membalas dengan serangan dari darat, laut dan udara. Pesawat-pesawat tempur Israel menghancurkan jalan - jalan dan jembatan - jembatan yang melintas di Lebanon Selatan, serangan ini dilakukan guna mendesak Hizbollah untuk membebaskan tentara - tentara Israel yang ditahan oleh mereka.

Keadaan di Timur Tengah semakin memanas akibat serangan Israel terhadap Lebanon, sehingga membuat keamanan regional Timur Tengah tidak stabil. Konflik yang terjadi antara keduanya dapat juga berakibat terhadap perdamaian dan

---

<sup>2</sup> <http://www.wikipedia.org>, Anonim, *Konflik Israel-Lebanon 2006, 2007*

keamanan internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa melihat kenyataan dan kondisi yang ada sangat tidak baik bagi keamanan Timur Tengah karena jika tidak segera dihentikan, peperangan antara kedua belah pihak tersebut dapat menyebabkan negara – negara lain terlibat dalam konflik ini.

Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utama Perserikatan Bangsa Bangsa yang tugasnya tergolong sebagai tugas eksekutif, akan tetapi tugas itu hanya terbatas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan, dan persenjataan. Dewan Keamanan didalam menangani permasalahan konflik antarnegara diusahakan menggunakan penyelesaian secara damai<sup>3</sup>. Jika penyelesaian secara damai dirasa tidak berhasil dan timbul ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan regional dan pelanggaran bagi perdamaian, Dewan Keamanan berwenang meredam konflik antar negara, hal ini merupakan implementasi dari tugas Dewan Keamanan<sup>4</sup> sebagai usaha mencapai tujuan utama Perserikatan Bangsa Bangsa yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pasal 24 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa :

*“Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan menjalankan kewajiban – kewajiban bagi pertanggung jawaban ini bertindak atas nama mereka.”*

Berdasarkan wewenang dalam menjaga perdamaian dan keamanan, Dewan Keamanan juga mempunyai wewenang menentukan peristiwa atau konflik yang

<sup>3</sup> Sugeng Istanto, 1998, "Hukum Internasional", Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 135

<sup>4</sup> Ibid.

terjadi merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, tapi oleh Dewan Keamanan konflik yang terjadi bisa dianggap bukan merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan. Akan tetapi konflik itu dapat dianggap sebagai suatu ancaman oleh Dewan Keamanan walaupun negara yang terlibat dalam konflik tidak menganggap itu sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan regional dan internasional. Sesuai dengan Bab VII Pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa :

*“Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.”*

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menjalankan tugasnya yang sejalan dan sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, baru turun tangan menangani suatu konflik jika konflik tersebut dianggap mengganggu stabilitas regional. Konflik Israel - Lebanon yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2006, sudah dianggap mengganggu stabilitas regional kawasan Timur Tengah, terutama negara yang berbatasan dengan Israel dan Lebanon. Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Sekretaris Jenderal Kofi Annan menganggap bahwa Hizbollah sebagai provokator dari serangan pada tanggal 12 Juli 2006 yang menyebabkan konflik ini terjadi.

Berkaitan dengan konflik Israel - Lebanon, Dewan Keamanan mengeluarkan sebuah resolusi yaitu Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1701 Tahun 2006. Resolusi ini dikeluarkan oleh Dewan Keamanan untuk meredam konflik yang terjadi, dan membuat situasi kembali menjadi normal di antara negara

yang bertikai, dan resolusi ini menarik kembali atau *recall* resolusi - resolusi yang ada sebelumnya, salah satunya Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1559 Tahun 2004<sup>5</sup> yang juga terkait dengan permasalahan Israel – Lebanon sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini maka penulis merumuskan suatu masalah yaitu :

“Bagaimanakah akibat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1701 terhadap konflik Israel - Lebanon tahun 2006?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

### **1. Tujuan Obyektif**

Tujuan yang didapat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1701 dalam menyelesaikan konflik Israel - Lebanon tahun 2006 terkait tugas dan fungsi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam memelihara perdamaian dan keamanan wilayah regional maupun internasional.

### **2. Tujuan Subyektif**

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm.48

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang kemudian diolah dalam rangka penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini adalah:

##### **1. Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Untuk memperoleh pengetahuan tentang akibat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan, khususnya kemampuan resolusi Dewan Keamanan 1701 dalam berakibat pada penyelesaian konflik Israel - Lebanon tahun 2006, serta guna mengetahui langkah – langkah penyelesaian konflik yang terdapat dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa 1701.

###### **b. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang akibat resolusi Dewan Keamanan dalam menyelesaikan suatu konflik, khususnya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1701 Tahun 2006 dalam konflik antara Israel - Lebanon tahun 2006 dan guna mengetahui langkah – langkah penyelesaian konflik

yang tercantum dalam resolusi tersebut, dengan harapan penelitian hukum atau skripsi ini dapat berguna bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

## 2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, sehingga dapat memberikan suatu sumbangan dan pengembangan bagi ilmu hukum secara khusus bagi Hukum Organisasi Internasional berkaitan dengan akibat resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan dalam menyelesaikan suatu konflik yang mengganggu perdamaian dan keamanan, baik itu perdamaian dan keamanan yang bersifat regional maupun internasional.

### **E. Keaslian Penelitian**

Bahwa sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan judul “Akibat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1701 terhadap Konflik Israel - Lebanon Tahun 2006”, belum diteliti oleh peneliti lain, sehingga penulisan ini merupakan karya asli dan bukan merupakan suatu plagiat.

### **F. Batasan Konsep**

Penulisan hukum ini terdapat batasan – batasan pengertian antara lain, yaitu :

1. Akibat adalah sesuatu keadaan yang ditimbulkan oleh sebab – sebab tertentu; sesuatu yang menjadi hasil pekerjaan atau kelakuan<sup>6</sup>.
2. Resolusi adalah sebuah keputusan yang dibuat dan selalu digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik dengan mencari solusi terbaik dan dibuat melalui proses persidangan atau sebuah keputusan yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu dalam menyelesaikan permasalahan<sup>7</sup>.
3. Konflik dalam arti harafiah dapat berarti pertentangan, percekocan, perselisihan, ketidaksamaan pendapat atau pandangan<sup>8</sup>, sedangkan dalam pengertian politik, konflik adalah permusuhan atau peperangan yang terjadi secara terus menerus antara dua kelompok atau lebih<sup>9</sup>. Tetapi dalam penelitian hukum ini pengertian konflik lebih ditekankan pada pengertian konflik secara politik.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1701 Tahun 2006 di dalamnya juga terdapat kaitan dengan 10 resolusi sebelumnya, tentang konflik Israel – Lebanon. Sehingga dalam batasan konsep Akibat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1701 Tahun 2006 terhadap Konflik Israel - Lebanon Tahun 2006 dapat diartikan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat dari dikeluarkannya resolusi sehingga mampu membawa perubahan dalam mengatasi permasalahan atau konflik, yang mengarah pada perbaikan keadaan khususnya pada

<sup>6</sup> Bambang Murhijanto, 1995, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", Penerbit Bintang Timur, Surabaya, hlm.20

<sup>7</sup> <http://www.wikipedia.org>, "Resolution", 2007

<sup>8</sup> Bambang Murhijanto, op.cit, hlm.329

<sup>9</sup> <http://www.wikipedia.org>, "conflict in political mean to an ongoing state of hostility between two or more groups of people", 2007



konflik antara Israel - Lebanon yang terjadi pada tahun 2006, yang didalam resolusi ini berkaitan dengan 10 resolusi sebelumnya tentang konflik Israel – Lebanon.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, artinya penelitian hukum yang berfokus pada norma meliputi peraturan - peraturan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini juga memerlukan data sekunder atau bahan hukum yang berupa pendapat lisan ataupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai kaitan dengan permasalahan.

### **2. Sumber Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer : bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, Resolusi – resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa yang terkait dengan penelitian hukum ini yaitu Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 425 Tahun 1978, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 426 Tahun 1978, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1701 Tahun 2006.

- b. Bahan hukum sekunder : yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah buku – buku, jurnal – jurnal hukum, surat kabar dan artikel – artikel
- c. Bahan hukum tersier : Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kamus Inggris – Indonesia, Oxford Learner’s Pocket Dictionary.

### 3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui studi kepustakaan.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Jakarta karena kantor – kantor tempat dilakukannya penelitian seperti UNIC dan CSIS berada di Jakarta.

### 5. Metode Analisis

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, dan dilakukan penarikan kesimpulan dengan proses penalaran deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke permasalahan yang sebenarnya.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

## **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang Konflik Israel – Lebanon tahun 2006, Tinjauan Mengenai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1701, serta Akibat Resolusi dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1701 terhadap konflik Israel – Lebanon tahun 2006.

## **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

